
Turbulensi Ekonomi Global Akibat Pandemi Covid 19 dan Dampaknya Pada Kota Bekasi

Hasanuddin[1], Djuni Thamrin [2], Cahyadi Husadha[3], Tutiek Yoganingsih[4], Elia Rossa[5]

Submitted : October, 29 2022
Revised : November, 18 2022
Accepted : December, 16 2022

Corresponding author e-mail: hasanuddin@dsn.ubharajaya.ac.id

- [1] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail address: hasanuddin@dsn.ubharajaya.ac.id,
[2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail address: djuni.thamrin@dsn.ubharajaya.ac.id
[3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail address: cahyadi.husadha@dsn.ubharajaya.ac.id
[4] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail address: tutiekyn@gmail.com
[5] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail address: rossa.gmp@gmail.com

Abstract

This study was conducted to determine the pressure experienced by the Bekasi City Government during the Covid 19 period, by comparing regional revenue and expenditure budget data from 2016 to 2021 from the budget side, especially on the side of regional income, regional expenditure, and regional original income. This study uses qualitative methods and the source of data used in this study is secondary data. This study found that the pre-Covid-19 budget posture, especially in 2016 and 2018 Bekasi City's income increased even though there was still a deficit because regional spending was still greater than regional income. Strong pressure on the Bekasi City budget occurred at the end of the 2019 fiscal year. The 2020 budget for all sources of Bekasi City income fell, this explains that the Covid 19 Pandemic is a determining factor in the shocks experienced by Bekasi City. The same thing happened in the 2021 Budget, sources of income such as regional taxes and regional levies still could not reach the target.

Keywords : Global Economy; Bekasi City; Government Spending APBD; Covid 19

JEL Classification : E42, E52, E58

1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019, dunia tersentak oleh kabar dari salah satu wilayah di China, Wuhan. Seorang dokter menemukan tujuh pasien di rumah sakit Kota Wuhan didiagnosa terjangkit virus varian baru yang belakangan dikenal dengan nama Covid 19. Penyebarannya begitu cepat, membuat otoritas diberbagai kota dan negara mengambil langkah menutup Kota

Wuhan (*lockdown*) dari keluar masuknya manusia dalam upaya memutus penyebaran Virus Corona, tetapi penyebaran virus tersebut tidak terbendung.

Dunia dibuat panik karena daya jangkit Covid 19 sangat cepat. Hingga 13 Januari 2022, 224 negara telah terinfeksi dengan jumlah pasien diseluruh dunia mencapai 317,573,406 orang, meninggal 5,530,657, dan yang dinyatakan sembuh terus meningkat dan telah mencapai 262,892,973 orang. Sementara di Indonesia pada tanggal yang sama dilaporkan kasus positif Covid 19 mencapai 4,268,097, sementara pasien yang sembuh 4,116,962, yang meninggal 144,150 orang. (Wordometers, 2022).

Centrum awal turbulensi yang berasal dari salah satu negara raksasa ekonomi dunia yaitu Cina. Getarannya semakin kuat dikarenakan Cina merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, dengan menyumbang 39,2 persen dari total pertumbuhan ekonomi dunia. Besarnya pengaruh negara Cina pada ekonomi dunia dapat dipahami karena Cina merupakan importir terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Turunnya permintaan barang oleh Cina mengakibatkan gangguan produksi negara pemasok. Bahkan Cina sebagai negara eksportir terbesar di dunia di mana banyak negara termasuk Indonesia bergantung pada pasokan barang dari negara tersebut tentu akan mengalami gangguan pada rantai produksi.

Covid 19 tidak hanya menyebabkan krisis pada sektor kesehatan saja, sektor lain-pun ikut terdampak. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang mengalami guncangan sangat kuat. Akibat virus ini *International Monitoring Fund* (IMF) bahkan mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 menjadi minus 3 persen, padahal awal tahun 2020 masih optimis bisa tumbuh dikisaran 3,3 persen. Bank dunia bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi global mengalami koreksi tajam dan tumbuh minus 5,2%, jauh lebih dalam dibanding prediksi IMF. Bahkan *organisation for economic co-operation and development* (OECD) memprediksi lebih ekstrim yakni minus 6% sampai minus 7,6%. Pertumbuhan seperti yang digambarkan OECD akan terjadi dengan 2 skenario. Pertama, jika Covid 19 bisa secepatnya diatasi, maka pertumbuhan hanya minus 6%. Kedua, jika terjadi gelombang kedua pandemi Covid 19 maka pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami tekanan sampai minus 7,6%. (Economic Cooperation and Development, 2020).

Tertekannya ekonomi dunia disebabkan terganggunya permintaan, stok, perdagangan, keuangan, komoditas, hingga pariwisata, (Maharani, 2020). Krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 telah berkembang sedemikian rupa dan menyebabkan kontraksi perekonomian global. Tidak seperti krisis-krisis sebelumnya, ia memukul bukan hanya sisi permintaan dari perekonomian, namun juga sisi penawaran perekonomian. Sehingga daya tekannya terhadap pertumbuhan menjadi sangat dirasakan di banyak negara, (Modjo, 2020). Hal tersebut menambah tekanan dan turbulensi yang membuat situasi ekonomi negara raksasa mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal I tahun 2020. Singapura misalnya mengalami pertumbuhan minus 2,2 persen, Cina minus 6,8 persen, Perancis minus 5,5 persen.

Turbulensi ekonomi terus berlangsung sampai kuartal ke II 2020 menyebabkan beberapa negara mengalami goncangan yang semakin kuat dan makin jauh masuk kedalam pusaran resesi ekonomi, seperti Jepang minus 4,8 persen, Jerman negatif 5 persen, Perancis minus 8,2 persen, Amerika Serikat minus 3,5 persen, Italia kontraksi 8,9 persen, Inggris bahkan mengalami kontraksi 9,9 persen. Pertumbuhan negatif juga dialami beberapa negara di ASEAN, yang terparah Filipina mengalami kontraksi 9,5 persen, Malaysia minus 5,6 persen, Singapura minus 5,4 persen, Thailand mengalami kontraksi 6,1 persen. Sama dengan negara ASEAN lainnya, ekonomi Indonesia juga mengalami tekanan kuat dan kontraksi 5,32 persen pada triwulan II tahun 2020. Di ASEAN hanya Vietnam yang tumbuh positif 2,91 persen pada 2020.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang terkoreksi cukup tajam ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kuartal I 2020 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen, turun dari target 5 persen. Dengan tekanan yang semakin kuat, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II berpotensi minus 3,8 persen melampaui target minus 3,1 persen. Pertumbuhan negatif ini salah satunya disebabkan beberapa daerah penyangga pertumbuhan ekonomi nasional memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan pergerakan ekonomi lokal melambat. OECD bahkan memprediksi jika terjadi gelombang kedua Covid 19, maka ekonomi Indonesia mengalami tekanan kuat dan tumbuh minus 3,9%, (Economic Cooperation and Development, 2020).

Dengan pertumbuhan dikisaran angka tersebut tentu semakin menyulitkan pemerintah Indonesia membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Pengangguran akan bertambah karena terjadi PHK, menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dampak lainnya adalah pemasukan dari sektor pajak rendah tentu semakin menambah tekanan. Terganggunya kinerja perekonomian satu wilayah akan mempengaruhi wilayah sekitarnya.

Salah satu kota yang ikut terdampak dan mengalami tekanan kuat akibat Covid 19 adalah Kota Bekasi. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi. Aktivitas ekonomi melambat, hunian hotel turun drastis, kegiatan usaha di Mall tutup berefek pada pemasukan dari sektor pajak dan retribusi, menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah Kota Bekasi. Sebagai kota yang mengandalkan perdagangan dan jasa, pendapatan Kota Bekasi mengalami penurunan dengan adanya berbagai pembatasan aktifitas, tentu ini akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan berbagai sumber pendapatan lainnya yang sah.

Peningkatan jumlah penderita yang terinfeksi Covid 19 dengan tingkat kematian yang tinggi sangat mengkhawatirkan. Kejadian yang luar biasa tersebut direspon oleh pemerintah diberbagai negara didunia dengan melakukan pembatasan mobilitas manusia. Pemerintah Indonesia turut melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan kebijakan dimana segala aktifitas dilakukan dari rumah termasuk belajar dan bekerja terutama pekerja sektor formal, pembatasan perjalanan, pengurangan hunian hotel, penutupan tempat-tempat wisata, restoran

dan berbagai tempat umum lainnya, membuat perputaran roda ekonomi melambat. Konsumsi masyarakat turun drastis, di mana sebelum pandemi Covid 19 menyumbang hampir 60% dari pergerakan ekonomi nasional. Penjualan ritel, baik di pasar tradisional maupun modern juga terdampak dan dipastikan akan jatuh, (Kusno, 2020). Sebelum kasus COVID-19 teridentifikasi di Indonesia, data Indeks Penjualan Riil dirilis oleh Bank Indonesia sudah menunjukkan kontraksi 0,3% pada Januari 2020, (Muzakki, 2020).

Gejala pemburukan ekonomi semakin menunjukkan tanda-tandanya. Pasar keuangan domestik pun tak luput dari guncangan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari derasnya arus modal keluar yang tercatat mencapai sebesar Rp.159,6 triliun antara Januari sampai April 2020. Jumlah *capital outflow* dalam rentang waktu singkat ini merupakan yang terbesar yang pernah dialami Indonesia semenjak 2009. Di waktu yang sama, volatilitas keuangan domestik juga tercatat meningkat yang ditandai dengan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di atas 33% pada Maret 2020, dan terdepresiasi nilai rupiah hingga menyentuh level Rp.16.505 per USD, meski saat ini sudah menurun di level Rp.15.000 per USD. Imbal hasil (Yield) obligasi pemerintah Republik Indonesia dengan tenor 10 tahun juga sempat meningkat ke level di atas 8% pada Maret 2020. (Modjo, 2020).

Tekanan dan guncangan ekonomi semakin memburuk dengan diberlakukannya pembatasan berbagai aktifitas yang tentu saja akan menghambat pertumbuhan ekonomi, kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya tentu akan terhambat. Padahal, negara memiliki tanggung jawab pengelolaan berbagai potensi ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan penduduknya, (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal, (Sukirno, 2006). Covid 19 membuat berbagai kegiatan tersebut melambat yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional minus.

Pertumbuhan minus pada ekonomi nasional tentu berdampak pada wilayah lain di Indonesia, karena sistem ekonomi sebuah negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa satu wilayah tidak dapat diperlakukan sebagai unit yang berdiri sendiri, yang disebabkan adanya interaksi sosial ekonomi antar wilayah diantaranya melalui perdagangan, aliran modal, migrasi difusi teknologi dan pertukaran informasi (Aspiansyah & Damayanti, 2019). Hal ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh determinan di wilayah itu sendiri, tetapi dipengaruhi juga oleh determinan dari wilayah lain dan pertumbuhan ekonomi wilayah lain, (Ertur & Koch, 2007).

Salah satu wilayah yang pendapatannya mengalami penurunan akibat Covid 19 adalah Kota Bekasi. Sebagai kota yang mengandalkan pendapatan dari perdagangan dan jasa, merasakan penurunan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi sebagai konsekwensi diberlakukannya

pengetatan berbagai aktifitas masyarakat termasuk kegiatan ekonomi. Berkurangnya pendapatan secara langsung mempengaruhi belanja pemerintah misalnya belanja pembangunan, kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan berbagai kegiatan lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan (Sukirno, 2006) bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal.

1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah ada pada obyek penelitian atau data hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan data sekunder yang digunakan adalah yang berkaitan atau relevan dengan masalah yang di bahas. Metode pengumpulan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan berbagai literatur, buku-buku, jurnal, laporan, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. (Nazir, 1988).

1.3 Pembahasan

Untuk mengetahui kinerja sektor ekonomi Kota Bekasi, maka, basis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya termasuk Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Data-data tersebut akan digunakan untuk membandingkan APBD Kota Bekasi sebelum dan selama masa Pandemi Covid 19. Berdasarkan perbandingan tersebut akan diketahui sekuat apa tekanan yang dialami Kota Bekasi dimasa Covid 19.

APBD Kota Bekasi tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 4.171.774.790.571, dimana Belanja Daerah sebesar Rp. 4.668.006.835.595, data ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah sehingga mengalami defisit Rp. 496.232.045.024. Sementara target PAD Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp. 1.611.380.416.976,70 yang bersumber dari Pajak Daerah dengan target Rp. 1.178.093.696.276,70, Retribusi Daerah Rp. 83.827.193.800, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 14.347.038.600, dan Rp. 335.112.488.300 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Tabel 5.1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Pendapatan Daerah	Rp. 4,171,774,790,571
Belanja Daerah	Rp. 4.668.006.835.595
(Defisit)	(Rp. 496.232.045.024)
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	Rp. 1.611.380.416.976,70
Pajak daerah	Rp. 1.178.093.696.276,70

Retribusi daerah	Rp. 83.827.193.800
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 14.347.038.600
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 335.112.488.300

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Realisasi target APBD 2016 dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pendapatan daerah Kota Bekasi dalam APBD Perubahan ada penambahan pendapatan sebesar Rp. 118.551.339.086, sehingga pada APBD Perubahan, pendapatan Kota Bekasi meningkat menjadi Rp. 4.290.326.129.657, yang sebelumnya sebesar Rp. 4.171.774.790.571. Walau terjadi kenaikan pada sisi pendapatan, namun Belanja Daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 367.428.879.982,40 dimana sebelumnya Rp. 4.668.006.835.595, sehingga pada APBD Perubahan menjadi Rp. 5.035.435.715.577,40. Walaupun terjadi kenaikan, namun defisit Belanja Daerah masih terjadi sebesar Rp. 745.109.585.920.

PAD Kota Bekasi sebelumnya ditetapkan dalam APBD 2016 sebesar Rp. 1.611.380.416.976,70, pada APBD Perubahan bertambah Rp. 75.280.069.547,30, sehingga melebihi target menjadi Rp. 1.686.660.486.524. Sementara Pajak Daerah juga bertambah dimana sebelumnya ditarget Rp. 1.178.093.696.276,70 meningkat menjadi Rp. 1.240.136.074.500 karena ada kenaikan sebesar Rp. 62.042.378.223,30. Penetapan target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami kenaikan kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak ada kenaikan, hasilnya sama dengan APBD dan APBD Perubahan yakni Rp. 14.347.038.600. Namun Retribusi Daerah meningkat dari target Rp. 83.827.193.800 menjadi Rp. 94.811.131.400 ada tambahan Rp. 10.983.937.600. Kenaikan yang sama juga terjadi pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah bertambah Rp. 2.253.753.724 melebihi target sebelumnya Rp. 335.112.488.300 menjadi Rp. 337.366.242.024.

Tabel 5.2. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Pendapatan Daerah	
Semula	Rp. 4.171.774.790.571
Bertambah	Rp. 118.551.339.086
Jumlah	Rp. 4.290.326.129.657
Belanja Daerah	
Semula	Rp. 4.668.006.835.595
Bertambah	Rp. 367.428.879.982,40
Jumlah	Rp. 5.035.435.715.577,40
(Defisit)	Rp. (745.109.585.920,40)
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	
Semula	Rp. 1.611.380.416.976,70

Bertambah	Rp. 75.280.069.547,30
Jumlah	Rp. 1.686.660.486.524
Pajak daerah:	
Semula	Rp. 1.178.093.696.276,70
Bertambah	Rp. 62.042.378.223,30
Jumlah	Rp. 1.240.136.074.500
Retribusi daerah:	
Semula	Rp. 83.827.193.800
Bertambah	Rp. 10.983.937.600
Jumlah	Rp. 94.811.131.400
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
Semula	Rp. 14.347.038.600
Bertambah	Rp. -
Jumlah	Rp. 14.347.038.600
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:	
Semula	Rp. 335.112.488.300
Bertambah	Rp. 2.253.753.724
Jumlah	Rp. 337.366.242.024

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD Kota Bekasi 2017, Pendapatan Daerah ditetapkan Rp. 4.532.976.286.431 dan Belanja Daerah Rp. 5.310.154.555.930. Sama dengan tahun sebelumnya terjadi defisit sebesar Rp.777.178.269.499 dimana lebih besar Belanja Daerah daripada Pendapatan Daerah. Sedangkan target PAD pada 2017 sebesar Rp. 1.827.107.722.405 meningkat dibanding tahun anggaran 2016. Demikian juga dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan target (lihat tabel 5.3). Namun, target pemasukan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, turun Rp. 330.790.116.705 dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp. 335.112.488.300.

Tabel 5.3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Pendapatan Daerah	Rp. 4.532.976.286.431
Belanja Daerah	Rp. 5.310.154.555.930
(Defisit)	Rp. (777.178.269.499)
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	
Pajak daerah	Rp. 1.379.239.176.600
Retribusi daerah	Rp. 100.579.334.700

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 16.499.094.400
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 330.790.116.705

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan target dalam APBD 2017 apakah tercapai, tidak tercapai, atau melebihi target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada APBD Perubahan tahun 2017. Pendapatan Daerah ada kenaikan pendapatan sebesar Rp. 653.139.787.668 meningkat menjadi Rp. 5.186.116.074.099 dimana sebelumnya ditetapkan Rp. 4.532.976.286.431. Selanjutnya pada Belanja Daerah ada penambahan sebesar Rp. 399.277.537.153 sehingga menjadi Rp. 5.709.432.093.083. Kenaikan tersebut mengurangi defisit yang sebelumnya Rp. 777.178.269.499 menjadi Rp. 523.316.018.983,98 terjadi pengurangan sebesar Rp. 253.862.250.515,02.

Sementara PAD pada APBD Perubahan mengalami kenaikan, semula Rp. 1.827.107.722.405 menjadi Rp. 2.352.843.540.287 karena ada penambahan Rp. 525.735.817.882. Kenaikan pendapatan terjadi pada semua sumber pendapatan Pemerintah Kota Bekasi, misalnya Pajak Daerah naik menjadi Rp. 1.505.318.277.800 disebabkan ada penambahan pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp. 126.079.101.200 dimana sebelumnya hanya ditargetkan sebesar Rp. 1.379.239.176.600. Retribusi Daerah sebelumnya hanya ditargetkan Rp. 100.579.334.700, naik menjadi Rp. 220.403.765.300 ada tambahan sebesar Rp. 119.824.430.600. Kenaikan pendapatan juga terjadi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.700.000.000, sehingga menjadi Rp. 21.199.094.400, dimana target hanya Rp. 16.499.094.400. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mendapat penambahan Rp. 275.132.286.082 sehingga naik menjadi Rp. 605.922.402.787, dimana target sebelumnya Rp. 330.790.116.705.

Tabel 5.4. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Pendapatan Daerah:	
Semula	Rp. 4.532.976.286.431
Bertambah	Rp. 653.139.787.668
Jumlah	Rp. 5.186.116.074.099
Belanja Daerah	
Semula	Rp. 5.310.154.555.930
Bertambah	Rp. 399.277.537.153
Jumlah	Rp. 5.709.432.093.083
(Defisit)	Rp. (523.316.018.983,98)
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	
Semula	Rp. 1.827.107.722.405
Bertambah	Rp. 525.735.817.882
Jumlah	Rp. 2.352.843.540.287

Pajak daerah:	
Semula	Rp. 1.379.239.176.600
Bertambah	Rp. 126.079.101.200
Jumlah	Rp. 1.505.318.277.800
Retribusi daerah:	
Semula	Rp. 100.579.334.700
Bertambah	Rp. 119.824.430.600
Jumlah	Rp. 220.403.765.300
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
Semula	Rp. 16.499.094.400
Bertambah	Rp. 4.700.000.000
Jumlah	Rp. 21.199.094.400
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:	
Semula	Rp. 330.790.116.705
Bertambah	Rp. 275.132.286.082
Jumlah	Rp. 605.922.402.787

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Tahun anggaran 2018, APBD Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp. 5.386.109.580.209 naik jika dibandingkan dengan APBD 2017, Rp. 4.532.976.286.431 maupun APBD Perubahan 2017 sebesar Rp. 5.186.116.074.099,02. Walaupun terjadi kenaikan namun defisit anggaran masih terjadi sebesar Rp. 478.682.233.200, sebab Belanja Daerah lebih besar dari Pendapatan Daerah yakni Rp. 5.864.791.813.409. Walau masih mengalami defisit, namun Pemerintah Kota Bekasi dapat menekan sehingga tidak sebesar defisit tahun anggaran sebelumnya yakni tahun anggaran 2017 maupun anggaran perubahan 2017, (tabel 5.3 dan tabel 5.4).

Target PAD pada tahun anggaran 2018, termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (tabel 5.5), meningkat jika dibandingkan tahun anggaran 2017 maupun anggaran perubahan 2017, (tabel 5.3 dan tabel 5.4). Namun, pada tahun 2018 Kota Bekasi memasuki tahun politik dimana akan dilangsungkan pemilihan Walikota/Wakil Walikota sehingga tidak dilakukan pembahasan anggaran perubahan sebagaimana biasanya untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran berjalan.

Tabel 5.5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Pendapatan Daerah	Rp. 5.386.109.580.209
Belanja Daerah	Rp. 5.864.791.813.409
(Defisit)	Rp. (478.682.233.200)

Pendapatan Asli Daerah (PAD):	Rp. 2.431.127.344.183
Pajak daerah	Rp. 1.742.132.421.869
Retribusi daerah	Rp. 115.472.947.750
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 18.532.767.100
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 554.989.207.464

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Melihat APBD Kota Bekasi tahun 2019 terjadi surplus karena Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah. Penetapan target PAD, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan disbanding tahun anggaran 2018, kecuali hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan targetnya sama dengan tahun sebelumnya yakni Rp. 18.532.767.100.

Tabel 5.6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Pendapatan Daerah	Rp. 6.637.597.202.085
Belanja Daerah	Rp. 6.617.597.202.085
Surplus	Rp. 20.000.000.000
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	Rp. 3.273.595.338.220
Pajak daerah	Rp. 2.112.685.416.179
Retribusi daerah	Rp. 171.535.755.990
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 18.532.767.100
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 967.759.650.869

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Penetapan APBD 2019 Kota Bekasi yang sebesar Rp. 6.637.597.202.085 mengalami kenaikan pada APBD Perubahan 2019 sebesar Rp. 334.962.652.790, sehingga besarnya menjadi Rp. 6.972.559.854.875. Walau demikian, Belanja Daerah yang semula Rp. 6.617.597.202.085 bertambah Rp. 430.858.170.175, sehingga terjadi kenaikan Rp. 7.048.455.372.260, kenaikan tersebut menyebabkan defisit sebesar Rp. 75.895.517.385 hal tersebut membuat Pemerintah Kota Bekasi belum bisa lepas dari defisit anggaran walau jumlahnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan defisit tahun-tahun sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada PAD, ada tambahan Rp. 72.428.220.559, sehingga pada APBD Perubahan, PAD Kota Bekasi berjumlah Rp. 3.346.023.558.779, yang sebelumnya Rp. Rp. 3.273.595.338.220. Pajak Daerah, Retribusi Daerah mengalami kenaikan (tabel 5.7). Namun, pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami penambahan nilainya tetap sama dengan tahun anggaran sebelumnya yakni Rp. 21.614.515.182. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berkurang sebanyak Rp. 182.421.898.754,34 sehingga menjadi Rp. 785.337.752.114,57 yang semula Rp. 967.759.650.869.

Tabel 5.7. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Pendapatan Daerah:	
Semula	Rp. 6.637.597.202.085
Bertambah	Rp. 334.962.652.790
Jumlah	Rp. 6.972.559.854.875
Belanja Daerah:	
Semula	Rp. 6.617.597.202.085
Bertambah	Rp. 430.858.170.175
Jumlah	Rp. 7.048.455.372.260
(Defisit)	Rp. (75.895.517.385)
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	
Semula	Rp. 3.273.595.338.220
Bertambah	Rp. 72.428.220.559
Jumlah	Rp. 3.346.023.558.779
Pajak daerah:	
Semula	Rp. 2.112.685.416.179
Bertambah	Rp. 182.972.340.576
Jumlah	Rp. 2.295.657.756.755
Retribusi daerah:	
Semula	Rp. 171.535.755.990
Bertambah	Rp. 71.877.778.737,34
Jumlah	Rp. 43.413.534.727,34
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
Semula	Rp. 21.614.515.182
Bertambah	Rp. -
Jumlah	Rp. 21.614.515.182
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:	
Semula	Rp. 967.759.650.869
Berkurang	Rp.(182.421.898.754,34)
Jumlah	Rp. 785.337.752.114,57

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Pembahasan APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2020 berada dalam suasana dimana penyebaran Virus Covid 19 berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai aktivitas dibatasi termasuk sektor ekonomi, sehingga terjadi pelambatan ekonomi dan salah

kota yang terdampak adalah Kota Bekasi. Tekanan pada ekonomi Kota Bekasi tercermin dari penetapan APBD 2020 sebesar Rp. 5.826.941.089.195 dimana terjadi penurunan sebesar Rp. 810.656.112.890 dibanding APBD 2019, Rp. 6.637.597.202.085. Walau terjadi penurunan target, namun anggaran 2020 surplus Rp. 25.000.000.000 karena Pendapatan Daerah lebih besar dibanding Belanja Daerah Rp. 5.801.941.089.195. Tentu saja hal tersebut menggembirakan bagi Pemerintah Kota Bekasi ditengah kuatnya tekanan dan guncangan oleh Covid 19 masih terjadi surplus anggaran.

Tekanan dan guncangan pada perekonomian Kota Bekasi mulai terlihat dari penetapan berbagai target pendapatan yang rata-rata turun dibanding APBD 2019. Target PAD 2020 berkurang Rp. 256.495.317.890 menjadi Rp. 3.017.100.020.330 dibanding PAD 2019 Rp. 3.273.595.338.220. Turunnya PAD Kota Bekasi karena target Pajak Daerah juga turun dari Rp. 2.112.685.416.179, PAD 2019 menjadi Rp. 2.120.698.889.047, PAD 2020. Target Retribusi Daerah 2020 juga turun Rp. 163.398.144.985, sebelumnya pada 2019 Rp. 171.535.755.990. Penetapan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan targetnya sama dengan tahun anggaran sebelumnya, 2019, Rp. 21.614.515.182. Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan target pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp. 711.388.471.116, yang sebelumnya yakni 2019, Rp. 967.759.650.869.

Tabel 5.8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Pendapatan Daerah	Rp. .826.941.089.195
Belanja Daerah	Rp. .801.941.089.195
Surplus	Rp. 25.000.000.000
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	
Pajak daerah	Rp. 2.120.698.889.047
Retribusi daerah	Rp. 163.398.144.985
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 21.614.515.182
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 711.388.471.116

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Setelah pembahasan dan penetapan APBD Perubahan 2020, terlihat semua target APBD 2020 tidak berjalan sesuai yang telah direncanakan. Pendapatan daerah terkoreksi cukup tajam yang semula ditargetkan Rp. 5.826.941.089.195 berkurang Rp. 555.542.703.133. Belanja Daerah ikut berkurang Rp. 56.604.743.979, yang semula ditargetkan Rp. 5.801.941.089.195 menjadi Rp. 5.745.336.345.216. Terkoreksinya Pendapatan Daerah dan berkurangnya Belanja Daerah menjelaskan bahwa ada tekanan kuat pada sektor ekonomi Kota Bekasi. Tekanan dan guncangan kuat pada pekeonomian Kota Bekasi tahun 2020 determinan faktornya karena pembatasan berbagai aktivitas masyarakat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid 19.

Berkurangnya pendapatan daerah dan belanja daerah disebabkan semua target tidak tercapai. PAD pada APBD Perubahan 2020 mengalami penurunan target cukup dalam dimana

sebelumnya ditetapkan Rp. 3.017.100.020.330 menjadi Rp. 2.095.144.151.883 terkoreksi Rp. 921.955.868.447. Tekanan kuat terjadi karena target awal tidak berjalan sesuai yang telah direncanakan. Seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, semua mengalami penurunan serta tidak mencapai target, (tabel 5.9).

Tabel 5.9. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Pendapatan Daerah	
Semula	Rp.5.826.941.089.195
Berkurang	Rp (553.542.703.133)
Jumlah	Rp. 5.273.398.386.062
Setelah perubahan	Rp. 5.273.398.386.062
Belanja Daerah	
Semula	Rp. 5.801.941.089.195
Berkurang	Rp. (56.604.743.979)
Jumlah belanja daerah berkurang setelah perubahan	Rp. 5.745.336.345.216
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	
Semula	Rp. 3.017.100.020.330
Berkurang	Rp. (921.955.868.447)
Jumlah	Rp. 2.095.144.151.883
Pajak daerah:	
Semula	Rp. 2.120.698.889.047
Berkurang	Rp. (534.761.210.195)
Jumlah	Rp. 1.585.937.678.852
Retribusi daerah:	
Semula	Rp. 163.398.144.985
Berkurang	Rp. (91.297.310.058)
Jumlah	Rp. 72.100.834.927
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
Semula	Rp. 21.614.515.182
Berkurang	Rp. (7.912.328.935)
Jumlah	Rp. 13.702.186.247
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:	
Semula	Rp. 711.388.471.116
Berkurang	Rp. (287.985.019.259)
Jumlah	Rp. 423.403.451.857

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Pembahasan dan penetapan APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2021 masih dalam upaya menahan dan mengatasi meluasnya penyebaran Virus Covid 19. Selain itu, tekanan dan guncangan pada perekonomian Kota Bekasi belum pulih jika melihat angka-angka pada APBD termasuk APBD Perubahan tahun 2020. Melihat angka penetapan pendapatan daerah pada APBD 2021 sebesar Rp. 5.909.045.828.498 dan belanja daerah Rp. 6.113.945.828.498 masih terjadi defisit Rp. 204.900.000.000.

Sementara penetapan target PAD pada APBD 2021 lebih kecil jika dibandingkan dengan APBD tahun sebelumnya, yakni Rp. 2.535.157.435.813 turunnya PAD karena berbagai target juga turun dibanding PAD 2020 (tabel 5.9), seperti, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Turunnya berbagai target pada APBD 2021 tidak dapat dipisahkan dari dibatasinya aktivitas masyarakat termasuk kegiatan ekonomi dalam rangka penanganan Covid 19, sehingga berbagai sumber pendapatan menjadi berkurang.

Tabel 5.10. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Daerah	Rp.5.909.045.828.498
Belanja Daerah	Rp.6.113.945.828.498
(Defisit)	Rp. (204.900.000.000)
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	
Pajak daerah	Rp.1.941.201.180.504
Retribusi daerah	Rp 104.208.002.409
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 11.579.005.526
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 478.169.247.374

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 pada sisi pendapatan daerah semula sebesar Rp. 5.909.045.828.498 berkurang Rp. 223.354.157.490 sehingga menjadi Rp. 5.685.691.671.008. Sementara dari sisi belanja daerah bertambah Rp. 335.669.062.364 menjadi Rp. 6.449.614.890.862 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp. 6.113.945.828.498. Melihat besaran pendapatan daerah dan belanja daerah terdapat selisih cukup besar yakni Rp. 763.923.219.854 dimana belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah. Angka tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2021 perekonomian Kota Bekasi belum pulih dari guncangan yang diakibatkan oleh Covid 19.

Target PAD pada APBD 2021 tidak tercapai bahkan berkurang pada APBD Perubahan Rp. 42.202.879.334 yang semula ditetapkan sebesar Rp. 2.535.157.435.813 menjadi Rp.

2.492.954.556.479. berkurangnya pendapatan dari sisi PAD disebabkan semua sumber PAD tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pajak daerah misalnya semula ditargetkan Rp. 1.941.201.180.504 berkurang Rp. 99.514.197.118 menjadi Rp. 1.841.686.983.386. Pendapatan dari sisi retribusi juga mengalami penurunan yang semula ditetapkan sebesar Rp. 104.208.002.409 berkurang Rp. 9.605.935.982 sehingga menjadi Rp. 94.602.066.427. Walau pada beberapa sumber pendapat tidak mencapai target pemasukan, namun rari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan yang semula Rp. 11.579.005.526 bertambah Rp. 1.583.081.926 menjadi Rp. 13.162.087.452. Kenaikan juga terjadi pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 65.334.171.840 sehingga menjadi Rp. 543.503.419.214 yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 478.169.247.374.

Tabel 5.11. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Daerah	
Semula	Rp.5.909.045.828.498
Berkurang	Rp (223.354.157.490)
Jumlah	Rp.5.685.691.671.008
Belanja Daerah	
Semula	Rp.6.113.945.828.498
Bertambah	Rp. 335.669.062.364
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.6.449.614.890.862
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	
Semula	Rp.2.535.157.435.813
Berkurang	Rp. (42.202.879.334)
Jumlah	Rp.2.492.954.556.479
Pajak daerah:	
Semula	Rp.1.941.201.180.504
Berkurang	Rp. (99.514.197.118)
Jumlah	Rp.1.841.686.983.386
Retribusi daerah:	
Semula	Rp. 104.208.002.409
Berkurang	Rp. (9.605.935.982)
Jumlah	Rp. 94.602.066.427
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
Semula	Rp. 11.579.005.526
Bertambah	Rp. 1.583.081.926
Jumlah	Rp. 13.162.087.452

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:	
Semula	Rp. 478.169.247.374
Bertambah	Rp. 65.334.171.840
Jumlah	Rp. 543.503.419.214

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Kenaikan pada dua sumber pendapatan asli daerah pada APBD Perubahan 2021 karena Pemerintah Kota Bekasi terus berinovasi ditengah situasi ekonomi yang sulit demi memperkuat ekonomi kota dan membangkitkan daya beli masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi agar dapat bertahan dan bangkit dari guncangan ekonomi seperti menyiapkan dana Rp. 37 Miliar bagi UMKM, mengadakan kegiatan Bekasi UMKM Fest 202, dan membangun kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu perekonomian masyarakat. (Hasanuddin, 2021).

1.4 Kesimpulan

Kondisi ekonomi Kota Bekasi yang belum pulih akibat banjir 2019, semakin sulit saat memasuki tahun anggaran 2020 karena adanya badai Covid 19. Dapat dilihat pada sisi pendapatan semakin tertekan dan tidak mencapai target. Target pendapatan daerah tahun anggaran 2020 Rp. 5.826.941.089.195 realisasi hanya Rp. 5.273.398.386.062 berkurang Rp. 553.542.703.133. PAD juga mengalami hal yang sama dimana target Rp. 3.017.100.020.330 terkoreksi sebanyak Rp. 921.955.868.447 realisas hanya Rp. 2.095.144.151.883. Sedangkan tahun anggaran 2021 pendapatan daerah dalam APBD Rp. 5.909.045.828.498 realiasi Rp. 5.685.691.671.008 artinya tidak mencapai target dan dan terkoreksi Rp. 223.354.157.490. Sedangkan PAD hanya mencapai Rp. 2.492.954.556.479 atau kurang Rp. 42.202.879.334 dari target Rp. 2.535.157.435.813.

Tahun anggaran 2020 dan 2021, merupakan tahun yang sangat sulit tekanan pada sektor ekonomi makin kuat walaupun berbagai kebijakan telah dibuat untuk mengatasi penyebaran serta dampak Covid 19, baik itu berupa pembatasan aktivitas, pemberian vaksin, stimulus ekonomi bagi pelaku ekonomi, bahkan bantuan langsung kepada masyarakat telah dilakukan, namun belum sepenuhnya dapat mengatasi apalagi mengembalikan situasi seperti keadaan sebelumnya. Kondisi itulah yang masih terus memberi tekanan pada sektor ekonomi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia masih mengalami tekanan. Sektor ekonomi yang belum pulih tentu saja berdampak langsung pada kondisi ekonomi pada level dibawah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Kota Bekasi tidak dapat menghindari guncangan tersebut, hal ini dapat dilihat pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2020 dimana semua sumber pendapatan mengalami penurunan (lihat tabel 5.8 dan tabel 5.9). Walau demikian APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2021 ada sumber pendapatan yang mengalami penurunan seperti pajak daerah dan retribusi daerah namun sumber lainnya seperti hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan (tabel 5.11).

Berdasarkan data APBD Kota Bekasi 2016 sampai 2021, beberapa tahun anggaran selalu mengalami defisit disebabkan belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Untuk itu diperlukan kajian mendalam agar dapat menemukan pos belanja daerah yang tidak mendesak atau bahkan tidak diperlukan sehingga bisa memperkecil bahkan dapat menyeimbangkan anggaran Kota Bekasi.

Untuk memperkecil dampak ekonomi pada masyarakat akibat Covid 19, bantuan langsung ke sektor usaha menengah kecil dan mikro agar dapat bertahan dengan demikian dapat menjadi pertahanan ekonomi Kota Bekasi. Selain itu Pemerintah Kota Bekasi perlu mengevaluasi bantuan langsung kepada masyarakat agar tepat sasaran sehingga program tersebut dapat terus dilanjutkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat agar perekonomian terus berjalan yang dengan sendirinya akan membuka sumber pendapatan bagi Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam situasi ketidakpastian karena Covid 19, sektor usaha dan masyarakat ikut merasakan dampaknya, karena itu pemerintah Kota Bekasi lebih fokus lagi untuk membantu masyarakat atau rumah tangga dan bisnis yang dilanda gangguan pasokan dan penurunan permintaan bisa jadi ditargetkan untuk menerima transfer tunai, upah subsidi, dan keringanan pajak, membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dan bisnis mereka untuk tetap bertahan. (Vitor Gaspar and Paolo Mauro, 2020).

Daftar Pustaka

- Aspiansyah, A., & Damayanti, A. (2019). Model Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Peranan Ketergantungan Spasial. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 62–83.
- Economic Cooperation and Development. (2020). *OECD Economic Outlook, June 2020*. <http://oecd.org/economic-outlook>
- Ertur, C., & Koch, W. (2007). Growth, technological interdependence and spatial externalities: theory and evidence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(6), 1033–1062.
- Hasanuddin. (2021). Upaya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kota Bekasi Menjaga Umkm Dalam Menghadapi Krisis Di Masa Pandemi Covid 19. *EQUITY: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 16, 11–18. <http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/equity/article/view/423>
- Kusno, F. (2020). Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19. *Anterior Jurnal*, 19(2), 94–102.
- Maharani, E. (2020). *Mari Elka Jelaskan Perbedaan Krisis Ekonomi 2008 dan 2020*. <https://www.republika.co.id/berita/q9c84c335/mari-elka-jelaskan-perbedaan-krisis-ekonomi-2008-dan-2020>
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi.

Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 103–116.

Muzakki, F. (2020). The Global Political Economy Impact of Covid-19 And The Implication to Indonesia. *Journal of Social Political Sciences*, 1(2), 76–92.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*.

Sukirno, S. (2006). *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: *PT Raja Grafindo Persada*.

Vitor Gaspar and Paolo Mauro. (2020). *Fiscal Policies to Protect People During the Coronavirus Outbreak*. IMF Blog. <https://blogs.imf.org/2020/03/05/fiscal-policies-to-protect-people-during-the-coronavirus-outbreak/> (Diakses 29 Desember 2021)

Wordometers. (2022). *COVID-19 Coronavirus Pandemic*. Wordometers. <https://www.worldometers.info/coronavirus/> (Diakses 13 Januari 2022)

Author Contributions: Hasanuddin, Djuni Thamrin , Cahyadi Husadha, Tutiek Yoganingsih and Elia Rossa, performed conceptualization, data curation, validation, and prepared the writing—original draft. They are supervised their self the work and conducted writing—review and editing. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

<http://bit.ly/3viIwUw>

